Bank Indonesia Nomor 16/19/DPM tanggal 28 November 2014 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/DPM tanggal 28 Januari 2014 perihal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

6. Ketentuan huruf E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal Bank dikenakan sanksi atas pelanggaran Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan/atau pelanggaran atas kewajiban setelmen Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, mekanisme pengenaan sanksi diatur sebagai berikut:

1. Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

huruf b dan Pasal 15 ayat (4) huruf b PBI dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah atau rekening giro valuta asing Bank yang ada di Bank Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.
DODDY ZULVERDI
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

(BN)

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/30/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 PERIHAL PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT (Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Nomor 18/8/DPSP, tanggal 2 Mei 2016)

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement sebagai berikut:

1. Ketentuan butir II.A.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Kegiatan korespondensi terkait kegiatan penyelenggaraan ditujukan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan terkait kepesertaan dan operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS ditujukan ke alamat:
Bank Indonesia
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Setelmen Dana dan Penatausahaan Surat Berharga
Gedung D Lantai 3
Jalan M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350.

- b. Kegiatan terkait pemantauan kepatuhan Peserta terhadap penyelenggaraan Sistem BI-RTGS ditujukan ke alamat:

Bank Indonesia

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Divisi Kepatuhan dan Informasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Gedung D Lantai 3

Jalan M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350.

2. Ketentuan butir III.F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. Perubahan Data Kepesertaan

Ruang lingkup perubahan data kepesertaan meliputi:

1. Perubahan Penggunaan Infrastruktur

- a. Perubahan penggunaan infrastruktur meliputi:

- 1) perubahan penggunaan infrastruktur yang dikelola sendiri menjadi penggunaan infrastruktur yang dikelola pihak lain;
- 2) perubahan penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain menjadi penggunaan infrastruktur yang dikelola sendiri; atau
- 3) perubahan penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain yang berbeda.

- b. Prosedur perubahan data kepesertaan terkait perubahan penggunaan infrastruktur diatur sebagai berikut:

- 1) Peserta menyampaikan surat permohonan perubahan penggunaan infrastruktur kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;
 - b) surat pernyataan dari Pimpinan yang menyatakan kesiapan infrastruktur dan memuat informasi spesifikasi infrastruktur se-

bagaimana yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir C.4.c; dan

- c) dalam hal Peserta menggunakan infrastruktur yang dikelola pihak lain maka selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b),

Peserta juga harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir C.4.d.

- 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
- b) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.

- 3) Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi infrastruktur yang digunakan Peserta.

- 4) Penyelenggara menyampaikan tanggapan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan mengenai:

- a) penolakan perubahan penggunaan infrastruktur Peserta beserta alasan penolakan; atau
- b) persetujuan perubahan penggunaan infrastruktur Peserta beserta tanggal efektif perubahan penggunaan infrastruktur Peserta.

2. Perubahan Participant Code

Perubahan participant code dapat dilakukan antara lain karena Peserta yang bukan merupakan anggota SWIFT berubah menjadi anggota SWIFT atau karena ad-

anya perubahan SWIFT BIC dari Peserta. Perubahan participant code diatur sebagai berikut:

a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan participant code kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen:

- 1) data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III; dan
- 2) dokumen pendukung yang menunjukkan sebagai anggota SWIFT atau adanya perubahan SWIFT BIC dari Peserta.

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
- 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahinya.

c. Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan perubahan participant code melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.

d. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan participant code, diatur sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan yang memuat antara lain sebagai berikut:
 - a) nama dan nomor Rekening Giro;
 - b) participant code yang baru; dan
 - c) permintaan agar Peserta me-

enuhi kelengkapan dokumen dalam rangka perubahan participant code.

2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 1)c), berupa surat permintaan Connected User dan Digital Certificate untuk participant code baru yang dilengkapi dengan:

- a) nama Peserta;
- b) participant code baru; dan
- c) Certificate Signing Request (CSR) yang digenerate dan disimpan di media compact disc (CD) yang bersifat read only.

3) Peserta menyampaikan file Certificate Signing Request (CSR) yang dihasilkan dari server yang akan diberikan Digital Certificate Soft Token dalam media compact disc (CD), melalui sarana surat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2).

4) Penyelenggara menyampaikan nama Connected User dan Digital Certificate baru kepada Peserta melalui sarana surat.

5) Penyelenggara memberitahukan tanggal efektif perubahan participant code kepada:

- a) Peserta yang bersangkutan melalui surat; dan
- b) seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya.

6) Peserta harus mengembalikan Digital Certificate Hard Token lama, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Peserta menerima surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1).

e. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan perubahan participant code, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasannya.

3. Perubahan Nama Peserta

Perubahan nama Peserta diatur sebagai berikut:

a. Peserta mengajukan surat permohonan

perubahan nama Peserta dalam Sistem BI-RTGS kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen:

- 1) data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dengan menggunakan nama yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh lembaga yang berwenang; dan
- 2) fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara berupa:
 - a) akta perubahan anggaran dasar untuk badan hukum Indonesia;
 - b) surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari lembaga yang berwenang; dan
 - c) surat keputusan dari lembaga yang berwenang tentang perubahan nama, dalam hal Peserta adalah Bank.

Bagi Bank yang berkantor pusat berkedudukan di luar negeri cukup menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c).

- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahinya.
- c. Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan perubahan nama Peserta dalam Sistem BIRTGS melalui surat yang penyampaiannya dapat dida-

hului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.

- d. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan nama Peserta dalam Sistem BI-RTGS, Penyelenggara memberitahukan kepada:
 - 1) Peserta yang bersangkutan mengenai persetujuan dan tanggal efektif perubahan nama Peserta; dan
 - 2) seluruh Peserta mengenai perubahan nama Peserta melalui administrative message atau sarana lain.
 - e. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan perubahan nama Peserta dalam Sistem BI-RTGS, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasannya.
4. Perubahan Kegiatan Usaha

Perubahan kegiatan usaha Peserta dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dapat menyebabkan adanya perubahan data Peserta antara lain nama Peserta, kegiatan usaha Peserta, nomor rekening, dan/atau participant code. Perubahan kegiatan usaha Peserta diatur sebagai berikut:

- a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam Sistem BI-RTGS kepada Penyelenggara dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh II.17 dalam Lampiran II.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara berupa:
 - 1) akta perubahan anggaran dasar;
 - 2) surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan

- 3) surat keputusan dari lembaga yang berwenang mengenai izin perubahan kegiatan usaha Peserta dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.
- c. Dalam hal perubahan kegiatan usaha berdampak pada perubahan kode Peserta maka Peserta harus mengajukan permohonan perubahan participant code dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
- d. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahinya.
- e. Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam Sistem BI-RTGS melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.
- f. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam Sistem BIRTGS, Penyelenggara memberitahukan kepada:
- 1) Peserta yang bersangkutan mengenai persetujuan dan tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta; dan
 - 2) seluruh Peserta mengenai perubahan kegiatan usaha Peserta melalui administrative message atau sarana lain.
- g. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam Sistem BIRTGS, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasannya.
5. Perubahan Nomor Rekening Giro
- a. Perubahan nomor Rekening Giro dapat dilakukan dalam hal terdapat kebijakan dari Bank Indonesia atau perubahan data Peserta yang menyebabkan perubahan nomor Rekening Giro Peserta di Penyelenggara.
- b. Dalam hal terdapat perubahan nomor Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara menginformasikan perubahan nomor Rekening Giro dan tanggal efektif perubahan nomor Rekening Giro kepada:
- 1) Peserta yang bersangkutan melalui surat; dan
 - 2) seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya.
6. Perubahan Alamat Kantor Peserta
- Perubahan alamat kantor Peserta dalam Sistem BI-RTGS diatur sebagai berikut:
- a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan alamat kantor Peserta kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen:
- 1) fotokopi surat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan alamat kantor dari lembaga yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara; dan
 - 2) data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dengan menggunakan alamat kantor yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1).

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
- 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahinya.

c. Penyelenggara menyampaikan surat tanggapan yang dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan bahwa perubahan alamat Peserta telah dicatat dalam tata usaha Penyelenggara, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan perubahan alamat kantor Peserta dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.

d. Dalam hal perubahan alamat kantor Peserta mengakibatkan perubahan lokasi RPP utama dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama, surat permohonan perubahan alamat kantor Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat perubahan lokasi RPP utama dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama.

7. Perubahan Lokasi RPP dan Pemindahan Jaringan Komunikasi Data (JKD) Peserta

Perubahan lokasi RPP dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) Peserta diatur sebagai berikut:

a. Peserta menyampaikan surat permohonan mengenai perubahan lokasi RPP utama, RPP cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama, dengan melampirkan formulir

data kepesertaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
- 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahinya.

c. Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan perubahan lokasi RPP utama, RPP cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan perubahan lokasi RPP utama, RPP cadangan, dan/atau jaringan komunikasi data (JKD) utama Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.

d. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan lokasi RPP utama, RPP cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama Peserta, Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan yang memuat antara lain sebagai berikut:

- 1) perubahan lokasi RPP utama dan/atau RPP cadangan, Peserta telah dicatat dalam tata usaha Penyelenggara;
- 2) pelaksanaan pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama; dan
- 3) kegiatan yang harus dilakukan oleh

Peserta terkait dengan perubahan lokasi RPP utama, RPP cadangan, dan/atau jaringan komunikasi data (JKD) utama.

- e. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan perubahan lokasi RPP utama, RPP cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama Peserta, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasannya.

8. Perubahan Pimpinan

Perubahan Pimpinan dapat berupa perubahan susunan, kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan. Perubahan Pimpinan diatur sebagai berikut:

- a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan Pimpinan kepada Penyelenggara dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud pada contoh II.18 dalam Lampiran II.
- b. Surat permohonan perubahan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sebagai berikut:
 - 1) fotokopi perubahan anggaran dasar mengenai pengangkatan Pimpinan, bagi Peserta yang berbadan hukum Indonesia;
 - 2) fotokopi bukti identitas diri Pimpinan yang masih berlaku berupa:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor, bagi Warga Negara Indonesia (WNI); atau
 - b) Paspor, Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan surat izin kerja dari lembaga berwenang, bagi Warga Negara Asing (WNA);
 - 3) bagi Pimpinan baru untuk Peserta berupa Bank, selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana

dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), harus melengkapi dokumen pendukung berupa:

- a) fotokopi keputusan fit and proper test;
- b) fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusat Bank yang berkedudukan di luar negeri kepada pimpinan kantor cabang berikut terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang dibuat oleh penerjemah tersetimpah; dan
- c) fotokopi struktur organisasi yang masih berlaku, bagi kantor cabang dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.

- c. Dalam hal terdapat perubahan kewenangan dan/atau jabatan Pimpinan, surat permohonan perubahan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan surat pernyataan tetap diberlakukannya spesimen tanda tangan Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh II.19 dalam Lampiran II.
- d. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahinya.
- e. Dalam hal perubahan Pimpinan mencakup perubahan Pimpinan baru maka Pimpinan baru harus membuat spesimen tanda tangan di hadapan pejabat Penyelenggara atau pejabat KPwDN setelah surat permohonan sebagaimana

na dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.

- f. Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan perubahan Pimpinan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.
- g. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan Pimpinan maka:
 - 1) Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan mengenai:
 - a) pembuatan spesimen tanda tangan bagi Pimpinan baru; dan
 - b) tanggal efektif pencabutan kewenangan Pimpinan dalam hal terdapat perubahan kewenangan Pimpinan;
 - 2) spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berlaku efektif sejak pemberitahuan dari Penyelenggara mengenai tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembuatan spesimen tanda tangan;
 - 3) data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih berlaku dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam butir 1)
 - b) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta, dalam hal Peserta tidak memberitahukan perubahan data Pimpinan kepada Penyelenggara.
- h. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan perubahan Pimpinan, Penyelenggara menyampaikan surat pe-

menolak perubahan Pimpinan dengan disertai alasannya.

9. Perubahan Kuasa

Perubahan kuasa dilakukan oleh Peserta dalam rangka penambahan, pergantian, dan/atau pencabutan kuasa Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi.

Perubahan kuasa diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadi penambahan dan/atau pergantian kuasa Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi, diatur hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peserta mengajukan surat permohonan penambahan dan/atau pergantian kuasa dari Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi, serta permohonan pembuatan spesimen tanda tangan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh II.20 dalam Lampiran II.
 - 2) Ketentuan pemberian kuasa mengacu pada butir II.C.10.b, butir III.C.10.c, dan butir III.C.10.d.
 - 3) perubahan kuasa berlaku efektif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan spesimen tanda tangan telah diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.
- b. Dalam hal terjadi pencabutan seluruh atau sebagian kuasa kepada Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi, diatur sebagai berikut:
 - 1) Peserta menyampaikan surat pernyataan pencabutan kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat pemberi kuasa dengan

menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh II.21 dalam Lampiran II.

- 2) Pencabutan seluruh atau sebagian kuasa berlaku efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan pencabutan kuasa diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.
- c. Dalam hal terjadi perubahan kewenangan dalam surat kuasa yang diberikan kepada Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi, diatur sebagai berikut:
 - 1) Peserta mengajukan surat permohonan perubahan kewenangan dalam surat kuasa yang dilampiri dengan surat kuasa yang baru dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh II.10, contoh II.11, atau contoh II.12 dalam Lampiran II.
 - 2) Surat permohonan perubahan kewenangan dalam surat kuasa disampaikan kepada:
 - a) Penyelenggara ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a untuk Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi yang berada di wilayah kerja KPBI;
 - b) KPwDN untuk Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi yang berada di wilayah kerja KPwDN; atau
 - c) Departemen Pengelolaan Uang untuk kuasa pengambilan fisik uang di wilayah kerja KPBI.
- d. Dalam hal Peserta tidak mengajukan permohonan perubahan kewenangan Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan

atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi kepada Penyelenggara maka data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih berlaku dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

10. Perbedaan Spesimen Tanda Tangan

Dalam hal terdapat perbedaan tanda tangan antara yang tercantum pada identitas diri dengan yang tercantum pada spesimen Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi yang ditatausahakan di Penyelenggara maka Peserta harus menyampaikan surat pernyataan perbedaan tanda tangan yang diketahui oleh Pimpinan atau pemberi kuasa sebagaimana dimaksud pada contoh II.22 dalam Lampiran II.

3. Ketentuan butir IV.C.5.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan pengiriman instruksi Setelmen Dana, dalam hal Peserta mengalami Keadaan Tidak Normal, Keadaan Darurat, atau alasan lain yang disetujui oleh Penyelenggara.
4. Ketentuan butir VI.B.1 dan butir VI.B.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Jenis dan Besarnya Biaya
 - a. Jenis biaya dalam penyelenggaraan Setelmen Dana terdiri atas:
 - 1) Biaya pengiriman instruksi Setelmen Dana, yang meliputi:
 - a) biaya pengiriman instruksi Setelmen Dana atas transaksi single credit; dan
 - b) biaya pengiriman instruksi Setelmen Dana atas transaksi multiple credit,

- ditetapkan berdasarkan masing-masing periode waktu.
- 2) Biaya administrative message ditetapkan untuk setiap pengiriman administrative message.
 - 3) Biaya perpanjangan periode waktu kegiatan atas permintaan Peserta ditetapkan berdasarkan durasi perpanjangan waktu setiap 30 (tiga puluh) menit.
 - 4) Biaya instruksi Setelmen Dana dengan menggunakan cek Bank Indonesia (Cek BI) dan/atau bilyet giro Bank Indonesia (BGBI) ditetapkan untuk setiap instruksi Setelmen Dana.
 - 5) Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Biaya ditetapkan berdasarkan durasi waktu penggunaan setiap 1 (satu) jam.
 - b) Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dihitung berdasarkan absensi yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Peserta.
 - 6) Biaya penggantian Digital Certificate Hard Token yang hilang atau rusak, dan penambahan Digital Certificate Hard Token yang melebihi batas maksimal, ditetapkan untuk setiap 1 (satu) Digital Certificate Hard Token yang diganti atau ditambah.
 - b. Besarnya biaya dalam penyelenggaraan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X.
 - c. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Besarnya biaya instruksi Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) tidak berlaku untuk pengiriman pengembalian instruksi Setelmen Dana oleh Peserta penerima, yang dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dana diterima oleh Peserta penerima.
 - e. Penyelenggara dapat tidak memberlakukan

biaya sebagaimana dimaksud dalam butir a.4), butir a.5), dan/atau butir a.6), apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara.

- f. Penyelenggara dapat membebaskan biaya sebagaimana dimaksud dalam butir a.4), butir a.5), dan/atau butir a.6), apabila terjadi Keadaan Tidak Normal bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Peserta dan/atau terjadi Keadaan Darurat di lokasi Peserta.
 - g. Dalam hal Penyelenggara membebaskan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Peserta tetap harus membayar Pajak Pertambahan Nilai atas biaya tertentu yang dibebaskan oleh Penyelenggara.
5. Contoh II.17, Contoh II.18, dan Contoh II.20 dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana dimaksud pada Contoh II.17, Contoh II.18, dan Contoh II.20 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 6. Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

BRAMUDIJA HADINOTO

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

(BN)